

Nomor :
 Lampiran :

KepadaYth. :
 Deputi Bidang Pembiayaan
 Kementerian Perumahan Rakyat
 Jl. R. Patah I No.1
 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Minat/Tidak Berminat⁾ Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011

Bersama ini kami menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)^{*)} antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan BPR/Koperasi⁾..... Nomor..... Nomor..... tentang maka BPR/Koperasi⁾ menyatakan bahwa:

1. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang belum dilakukan pembayaran subsidiya oleh Kementerian Perumahan Rakyat / masih memiliki kuota subsidi sebagai berikut:
 - a. Jumlah KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 /30 September 2009⁾ dan belum dilakukan pembayaran subsidiya untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

KelompokSasaran	KPRS Bersubsidi		KPRS MikroBersubsidi	
	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)
I				
II				
III				
Total				

- b. Jumlah KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan skim selisih bunga dibayar tahunan yang belum lunas pembayaran subsidiya menurut kelompok sasaran adalah sebagai berikut (bila ada):

KelompokSasaran	KPRS Bersubsidi		KPRS Mikro Bersubsidi	
	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)
I				
II				
III				
Total				

2. Berminat/tidak berminat⁾ untuk melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diatas akan dibayar sekaligus dimuka didahului dengan rekonsiliasi.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....

Pimpinan BPR/Koperasi⁾.....

.....

(Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan:

1. Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten
2. Kantor Bank Indonesia Provinsi

⁾ Coret yang tidak perlu

^{*)} PKO yang berlaku pada saat penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi



LAPORAN HASIL VERIFIKASI LPK

Nomor:

Bahwa Tim Pelaksana Verifikasi..... telah melakukan Verifikasi LPK pada BPR/Koperasi^o dari tanggal bulan Tahun sampai dengan tanggal bulan Tahunsesuai Permenpera Nomor Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk BPR:

a. Profil BPR antara lain meliputi:

- 1) Susunan pengurus;
- 2) Pemegang saham;
- 3) Permodalan;
- 4) Domisili; dan
- 5) Asset.

b. Photo copy KTP pengurus BPR sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku atau hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;

c. Aspek Legalitas BPR pada saat pengajuan:

- 1) domisili BPR;
- 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
- 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- 4) mempunyai surat izin operasi dari instansi yang berwenang

d. Aspek Keuangan BPR pada saat pengajuan yaitu mempunyai kemampuan untuk menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dibutuhkan.

e. Surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011 (Format A).

f. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

g. Telah ada realisasi fisik dilapangan %

h. Masih memiliki kuota subsidi

i. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi

j. BPR yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sebelum tahun 2009;

k. Surat rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori sekurang-kurangnya sehat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

l. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor BPR dan pemeriksaan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan BPR.

2. Untuk Koperasi:

a. Profil Koperasi antara lain meliputi:

- 1) Daftar nama pendiri;
- 2) Susunan pengurus;
- 3) Permodalan;
- 4) Domisili; dan
- 5) Asset.

- b. Photo copy KTP pengurus Koperasi sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;
- c. Aspek Legalitas Koperasi pada saat pengajuan:
 - 1) domisili Koperasi;
 - 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan AD/ART beserta perubahannya;
 - 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - 4) mempunyai surat izin operasi dari instansi yang berwenang.
- d. Aspek Keuangan Koperasi pada saat pengajuan:
 - 1) total aset pada neraca paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 4 (empat) tahun buku terakhir;
 - 3) kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dibutuhkan, dibuktikan dengan selisih Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan atau surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - 4) sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
 - 5) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau telah memperoleh sertifikat atau pernyataan hasil penilaian kesehatan dari Dinas/Kantor Koperasi Kota/Kabupaten setempat dengan predikat Sehat;
 - 6) mempunyai rekening giro atas nama Koperasi.
- e. Surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011 (Format A).
- f. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sampai dengan tanggal 30 September 2009.
- g. Telah ada realisasi fisik dilapangan %.
- h. Masih memiliki kuota subsidi.
- i. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi.
- j. Koperasi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sebelum tahun 2009.
- k. Surat rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori sekurang-kurangnya sehat yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten.
- l. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor Koperasi dan pemeriksaan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan Koperasi.

Berdasarkan Verifikasi LPK sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan bahwa BPR/Koperasi^{*)} dianggap LAYAK/ TIDAK LAYAK^{*)} untuk meneruskan Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Demikian Surat Keterangan Hasil Verifikasi LPK ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi*.

.....
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

^{*)} Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
DOKUMEN VERIFIKASI LPK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan
atas nama :
Alamat :
No. Telp/Fax :
Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa segala dokumen yang telah kami berikan kepada Tim Verifikasi adalah benar dan sah.
2. Semua informasi tertulis dan bukti penunjang yang ditunjukkan menggambarkan situasi dan fakta yang sesungguhnya dan telah dinyatakan benar adanya.
3. Bahwa Tim Verifikasi hanya bertanggungjawab sebatas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh BPR/Koperasi *)
4. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar/palsu maka kami bersedia dicabut keikutsertaannya sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPK ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggung jawab.

.....
Pimpinan BPR/Koperasi*).....

Materai
Rp 6.000,-

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

*)Coret yang tidak perlu

note: yang bertandatangan harus sesuai dengan AD LPK atau surat keterangan kepengurusan yang sah, bahwa nama tersebut merupakan orang yang berwenang untuk bertindak mewakili LPK tersebut.

**SURAT PERNYATAAN TELAH
DIVERIFIKASI LPK**

Pada hari ini tanggal, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

Bersama ini saya menyatakan bahwa terhadap instansi tersebut diatas telah dilakukan Verifikasi LPK oleh Tim Pelaksana Verifikasi mulai tanggal selesai tanggal sebagaimana dituangkan dalam:

1. Laporan Hasil Verifikasi LPK (Format B) tanggal nomor
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPK (Format C) tanggal

Demikian Surat Pernyataan Telah Diverifikasi LPK ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan ***dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.***

.....
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi
.....

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

Daftar Debitur Calon Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi TA 2011

Format E

BPR/koperasi *) :
Bulan Transaksi :

No	Kota/ Kabupaten	Lokasi/ Alamat Rumah	Data Debitur					Perjanjian Kredit		Infomasi Kredit				Subsidi			Data Rumah			
			Nama Debitur	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Kredit	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp)	Dana Tabungan/S wadaya (Rp)	Nilai Kredit	Tenor (Th)	Skim	Tahun/ Tahap	Jumlah (Rp)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Luas (m2)	
																			Bng	Tanah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total																				

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut debitur
 Kolom 2 : Nama Kota/Kabupaten dari lokasi rumah
 Kolom 3 : Lokasi rumah (ditulis lengkap)
 Kolom 4 : Nama debitur pengambil kredit
 Kolom 5 : Nomor KTP Debitur
 Kolom 6 : Nama ibu kandung debitur
 Kolom 7 : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/Polri; PNS; Swasta;Wiraswasta)
 Kolom 8 : Penghasilan debitur
 Kolom 9 : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPK
 Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
 Kolom 11 : RAB pembangunan/perbaikan
 Kolom 12 : Tabungan/Dana Swadaya debitur
 Kolom 13 : Nilai KPRS/KPRS Mikro yang diberikan kepada debitur
 Kolom 14 : Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun)
 Kolom 15 : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1.IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4 membangun/memperbaiki rumah)
 Kolom 16 : Tahap KPRS Mikro Bersubsidi (1 unt 4 th; 2 unt 3 th; 3 unt 2 th;4 unt 1 th; 5 unt 6 bl)
 Kolom 17 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah
 Kolom 18 : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T=Rumah 1/2 Tembok, RKP=Rumah Kayu Panggung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung)
 Kolom 19 : Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT2,RS-1, RS-2
 Kolom 20 : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki
 Kolom 21 : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki
 *) : Pilih salah satu

.....
 Pemimpin BPR/Koperasi *)

(.....)

Format F

Bulan Transaksi :

Keterangan:

- Ketua Tim Pelaksana Verifikasi

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DEBITUR DAN REALISASI FISIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Status Perkawinan :
 Alamat :
 No. Telepon :

MENYATAKAN

1. Bahwa segala dokumen dan surat pernyataan yang telah kami berikan kepada BPR/Koperasi *) dan Tim Pelaksana Verifikasi adalah benar dan sah.
2. Bahwa telah melakukan realisasi fisik sekurang-kurangnya 30% dari Rencana Pembangunan/Perbaikan Rumah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar/palsu dan realisasi fisik kurang dari 30% maka kami bersedia dicabut keikutsertaannya sebagai debitur penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Debitur dan Realisasi Fisik ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggung jawab.

.....
 Nama Debitur

Materai
Rp 6.000,-

.....
 (Tanda tangan & nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PERNYATAAN TELAH
DIVERIFIKASI DEBITUR**

Nomor:

Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh Nomor tanggal, pada hari ini, tanggal, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

Menyatakan telah diverifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Verifikasi telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad pembiayaan sesuai daftar Daftar Debitur Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diajukan oleh Pihak BPR/Koperasi. Pelaksanaan verifikasi dimulai pada tanggal dan selesai pada tanggal
2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan/ Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah
I	42.000.000			5.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
II	42.000.000			7.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
III	42.000.000			9.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
Total I				

3. Sebagai kelengkapan Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur, dilampirkan:
 - a. Laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh..... Nomor.....Tanggal.....
 - b. Daftar Debitur Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang Lolos Verifikasi Administrasi, Wawancara dan Pengecekan Lapangan TA 2011 (Format I).
4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Verifikasi tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.*

.....
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi
.....

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

Bulan Transaksi : _____

Format I

Keterangan:

- Ketua Tim Pelaksana Verifikasi

(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SUBSIDI
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH MELALUI KPRS/KPRS MIKRO
BERSUBSIDI**

Pada hari ini, tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat LPK :

selanjutnya disebut LPK,

2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

selanjutnya di sebut debitur,

menyatakan bahwa:

1. LPK bertanggungjawab menyalurkan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp (.....) kepada debitur.
2. Debitur bertanggungjawab menggunakan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp (.....) akan digunakan untuk pembangunan/perbaikan*) rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
3. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana subsidi perumahan pada angka 1 dan 2 di atas, LPK dan debitur bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi*.

LPK

.....

Debitur

.....

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

*)Coret yang tidak perlu

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
 Kementerian Perumahan Rakyat
 Jl. R Patah I No. 1 Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Tahun 2011

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor tanggal , maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	KPRS /KPRS Mikro Bersubsidi	
	UNIT	Dana Subsidi (Rp.)
I		
II		
III		
Total		

2. Penerima dana:

- Nama BPR/Koperasi) :
 - Nama Bank :
 - Nama rekening :
 - Nomor rekening :
 - NPWP :

3. Lampiran terdiri dari;

- Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Verifikasi (Format H)
- Laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh Nomor tanggal.....;
- Kuitansi pembayaran (Format L);
- Faktur pajak dan SSP (bila ada);
- Daftar debitur penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang lolos Verifikasi administrasi, wawancara dan pengecekan lapangan TA 2011 (Format I);
- Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi (Format J);
- Jaminan Subsidi Perumahan (Format M) sebesar 5% dari nilai subsidi yang akan diterima LPK atas pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan asuransi atau Perusahaan Penjaminan; dan
- Jaminan Perseorangan (Personal guarantee) menggunakan Format N dari LPK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan BPR/Koperasi).....

.....
 (Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan

1. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

)Coret yang tidak perlu

Nomor : (01)	KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Sudah Terima Uang Dari :	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat
Jumlah Uang :	(02)
Terbilang :	(03)
Untuk Pembayaran :	(04) Pembayaran Subsidi Kredit Perumahan (KPR-RSH) Tahun berdasarkan Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Debitur Nomor :
Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (09)	(05)....., Tanggal (06)..... (07)..... (08)..... <div>Materai Rp. 6.000,-</div> Nama Lengkap NIP :

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

(Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan)

SURAT JAMINAN SUBSIDI PERUMAHAN

Nomor Jaminan : _____

Nilai Rp _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama dan alamat penyedia] sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan (LPKP) _____, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama dan alamat perusahaan penjaminan] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama dan alamat PPK] sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____) yang harus dibayarkan kepada PENERIMA JAMINAN.
2. Bahwa kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.
3. Bahwa TERJAMIN dengan suatu perjanjian tertulis No. _____ tanggal _____ telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PENERIMA JAMINAN untuk melaksanakan penyaluran Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai subsidi yang telah disetujui sebesar Rp _____ (terbilang _____) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
4. Bahwa untuk Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut diatas, PENJAMIN setuju membayar kepada PENERIMA JAMINAN, 5% (lima persen) dari jumlah subsidi yang akan disalurkan sebesar Rp _____ (terbilang _____) sebagai jaminan subsidi perumahan sebelum pelaksanaan penyaluran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
5. Jika TERJAMIN telah menyalurkan subsidi sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dan dinyatakan tidak ada temuan oleh tim audit maka PENERIMA JAMINAN wajib mengembalikan uang jaminan tersebut sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah subsidi;
6. Jika TERJAMIN tidak menyalurkan subsidi sesuai PKO dan terdapat temuan tim audit maka surat jaminan ini dicairkan jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai tanggal _____ sampai dengan tanggal _____ (selama berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal yang telah ditetapkan)
7. Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada PENJAMIN segera setelah TERJAMIN cidera janji (Wanprestasi/*default*) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak menyalurkan dana subsidi perumahan sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
8. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN.

9. Dengan menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
10. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
Pada Tanggal _____

TERJAMIN	PENJAMIN
(_____) Nama Jelas	(_____) Nama Jelas

Imbal Jasa Penjamin IDR _____
Terbilang _____

*Untuk keyakinan, Penerima
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini
ke _____[Penerbit jaminan]*

JAMINAN PERSEORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BPR/Koperasi (LPK)____ , badan hukum berkedudukan di ____ , dalam hal ini diwakili ____ Direktur/Direksi/Ketua/Manajer____ selanjutnya disebut PENJAMIN.
2. Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Andri Yusandra, ST. MUM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor ____ Tanggal ____ antara LPK ____ dan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat ____ .

PENJAMIN menerangkan bahwa untuk menjamin terlaksananya penyaluran subsidi tepat sasaran dan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor ____ Tanggal ____ beserta perubahannya, maka PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri terhadap Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat berkedudukan di Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama LPK____ kepada PENERIMA JAMINAN serta bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya penyaluran subsidi sesuai dengan pernyataan kelayakan debitur sebanyak____debitur, berdasarkan hasil Verifikasi Debitur oleh Tim Verifikasi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional beserta perubahannya.

PENJAMIN selanjutnya dengan tegas menyatakan:

1. Jaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada dan untuk kepentingan PENERIMA JAMINAN dengan melepaskan segala hak-hak utama (*privileges*) yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang PENJAMIN, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) hak-hak utama yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 1831, 1837, 1838, 1843, 1847, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengakui jaminan ini sebagai bukti yang sah dan akan menerima baik, semua data-data yang terdapat dalam Laporan Verifikasi LPK dan Laporan Verifikasi Debitur baik mengenai jenis maupun jumlah yang bersangkutan, dengan apa yang telah disalurkan oleh LPK.
3. Membayar jumlah yang termasuk di sub 2 tersebut di atas dan mengakuinya sebagai penyimpangan penyaluran subsidi tanpa atau harus diperlukan suatu teguran atau Pernyataan lalai terlebih dahulu, jika PENERIMA JAMINAN memberitahukan bahwa LPK____ tidak memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional dan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi terhadap YANG DIJAMIN yaitu Kementerian Perumahan Rakyat.

4. PENJAMIN juga melepaskan haknya untuk meminta kepada Lembaga/Badan Negara yang berhak guna meng-eksekusi barang-barang jaminan lainnya terlebih dahulu sebelum kewajiban-kewajibannya berdasarkan penjaminan ini dilaksanakan.
5. Jika LPK _____ tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur penerima subsidi sesuai hasil Verifikasi Debitur oleh Tim Audit yang sesuai dengan Permen Perubahan _____ tahun 2011, maka LPK secara otomatis memberi kuasa, yang tidak akan berakhir karena alasan apa pun juga, dan dengan hak substitusi kepada PENJAMIN untuk menyetorkan ke kas Umum Negara atau yang sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Audit Tim Audit pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi atau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
6. Penjaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN terhitung mulai tanggal penandatanganan pemberian jaminan ini dan berlaku terus sampai ada pemberitahuan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN.
7. Khusus dalam hal kepailitan atau dalam hal pembekuan atas PENJAMIN _____, baik sewaktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, PENERIMA JAMINAN tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari LPK untuk mengadakan persetujuan atas penyelesaian. Dalam hal ini PENERIMA JAMINAN masih tetap mempunyai hak tagih terhadap LPK _____, untuk jumlah seluruhnya sesuai rekomendasi Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.

PENJAMIN telah mengetahui dan dengan ini menyetujui segala ketentuan-ketentuan dari syarat-syarat yang termaktub dalam Perjanjian Perorangan tersebut di atas. PENJAMIN menyetujui untuk melaksanakan dan memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pemberian Jaminan ini.

Mengenai segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

PENJAMIN

PENERIMA JAMINAN

Kop Surat BPR/ Koperasi

Format O

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. R Patah I No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke.....(n) untuk penerbitan KPRS Bersubsidi bulan tahun

Bersama ini kami sampaikan bahwa KPRS Bersubsidi dengan skim Subsidi Selisih Bunga BPR/Koperasi penerbitan bulan tahun telah memasuki tahun ke, untuk itu kami sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah subsidi perumahan yang telah diterima tahun ke(n-1) adalah Rp. (.....).
2. Jumlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp..... (.....) dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI rate rata-rata = % (rata-rata dari BI rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan margin % (margin tetap =% dan margin variabel%) sehingga terdapat kekurangan/kelebihan bayar sebesar Rp. (.....) sebagaimana terlampir (Format P1)
3. Permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + margin tetap) sebagaimana terlampir (Format P2) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi Selsih Bunga				
		Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1) ...	Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1) ...	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n)	Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n) ..
1	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 +7)
I						
II						
III						
Total						

4. Terlampir kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi (Format P);
 - b. Kuitansi Pembayaran (Format L) ;
 - c. Faktur Pajak dan SSP (bila ada);
 - d. Daftar Realisasi dan Rekonsiliasi Debitur KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi disertai soft copy (Format Q).
5. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan BPR/Koperasi*).....

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan

1. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

Format P

*) Coret yang tidak perlu

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

Nomor : /BA-VER/.... /

Sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPK Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dengan BPR/Koperasi *) Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dari BPR/Koperasi*)..... Nomor : tanggal perihal Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke (n) untuk penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi bulan tahun, pada hari ini, tanggal....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No....., tanggal.....:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan rekonsiliasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tim Pelaksana Verifikasi dan Pihak BPR/Koperasi *) secara bersama-sama telah melakukan pengecekan data dan perhitungan kembali atas jumlah subsidi yang telah diterima BPR/Koperasi *)... untuk penerbitan KPRS Bersubsidi tahun ke bulan tahun sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format P1 yang diajukan oleh BPR/Koperasi. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi mulai dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari BPR/Koperasi*).
2. Hasil Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)		
			Telah Diterima	Hasil Perhitungan Rekonsiliasi	Selisih
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)
I	42.000.000				
	30.000.000				
	20.000.000				
II	42.000.000				
	30.000.000				
	20.000.000				
III	42.000.000				
	30.000.000				
	20.000.000				
Total I					

3. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke (n) penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi bulan tahun sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)		
			Jumlah Dana Subsidi Tahun ... (n)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah yang Dibayar
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)
I	42.000.000				
	30.000.000				
	20.000.000				
II	42.000.000				
	30.000.000				
	20.000.000				
III	42.000.000				
	30.000.000				
	20.000.000				
Total I					

4. Sebagai kelengkapan Berita Acara Rekonsiliasi, dilampirkan Format P1 dan P2 yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Pemimpin BPR/Koperasi^{*)}.
5. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
6. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

(.....)

(.....)

(.....)

Ka. Satker

Mengetahui
PK

Pimpinan BPR/Koperasi ^{*)}

(.....)

(.....)

(.....)

^{*)} Coret yang tidak perlu

Format P2

Bulan Transaksi :

Keterangan:

- | | |
|----------|--|
| Kolom 1 | : Nomor urut debitur |
| Kolom 2 | : Nama Kota/Kabupaten dari lokasi rumah |
| Kolom 3 | : Lokasi rumah (ditulis lengkap) |
| Kolom 4 | : Nama debitur pengambil kredit |
| Kolom 5 | : Nomor KTP Debitur |
| Kolom 6 | : Nama ibu kandung debitur |
| Kolom 7 | : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) |
| Kolom 8 | : Penghasilan debitur |
| Kolom 9 | : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPK |
| Kolom 10 | : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit |
| Kolom 11 | : RAB pembangunan/perbaikan |
| Kolom 12 | : Tabungan/Dana Swadaya debitur |
| Kolom 13 | : Nilai KPRS/KPRS Mikro yang diberikan kepada debitur |
| Kolom 14 | : Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun) |
| Kolom 15 | : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1. IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3. uang muka, 4. membangun/memperbaiki rumah) |
| Kolom 16 | : Tahap KPRS Mikro Bersubsidi (1. unt 4 th; 2. unt 3 th; 3. unt 2 th; 4. unt 1 th; 5. unt 6 bl) |
| Kolom 17 | : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah |
| Kolom 18 | : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T=Rumah 1/2 Tembok, RKP=Rumah Kayu Panggung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Panggung) |
| Kolom 19 | : Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT2, RS-1, RS-2 |
| Kolom 20 | : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki |
| Kolom 21 | : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki |
| *) | : Pilih salah satu |

Pimpinan BPR/Koperasi *)

(.....)

Daftar Realisasi dan Rekonsiliasi Debitur KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk Perumahan TA.Rekonsiliasi ke

[illegible]

Keterangan:

- | | |
|----------|---|
| Kolom 1 | : Nomor urut debitur |
| Kolom 2 | : Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah yang dibeli |
| Kolom 3 | : Pengembang dan Lokasi rumah (ditulis lengkap) |
| Kolom 4 | : Nama debitur pengambil kredit perumahan |
| Kolom 5 | : Nomor KTP debitur |
| Kolom 6 | : Nama ibu kandung debitur |
| Kolom 7 | : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta) |
| Kolom 8 | : Penghasilan debitur |
| Kolom 9 | : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP |
| Kolom 10 | : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit |
| Kolom 11 | : RAB pembangunan/perbaikan rumah |
| Kolom 12 | : Tabungan/ Dana Swadaya debitur |
| Kolom 13 | : Nilai KPRS yang diberikan kepada debitur |
| Kolom 14 | : Waktu kredit (tenor) yang digunakan dalam perjanjian kredit (tahun) |
| Kolom 15 | : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1. IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3 uang muka, 4. membangun/ memperbaiki rumah) |
| Kolom 16 | : Tahun ke ..., masa subsidi |
| Kolom 17 | : Besarnya dana subsidi yang telah diterima tahun ke ... masa subsidi |
| Kolom 18 | : Besarnya dana subsidi yang seharusnya diterima tahun ke ... masa subsidi |
| Kolom 19 | : Selisih antara 17 dan 18 |
| Kolom 20 | : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP= Rumah Kayu Pangung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Pangung) |
| Kolom 21 | : Tipe Rumah diisi RIT-1, RIT-2, RsS-1, RsS-2 |
| Kolom 22 | : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki |
| Kolom 23 | : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki |

Bank / LKNB/ Koperasi

(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
TENTANG
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA SUBSIDI
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH MELALUI KPRS/KPRS MIKRO
BERSUBSIDI**

Pada hari ini, tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
- Instansi :
- Alamat LPK :

selanjutnya disebut LPK,

2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

selanjutnya disebut debitur,

menyatakan bahwa:

1. LPK telah menyalurkan dana subsidi Perumahan kepada debitur sejumlah Rp (.....) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Debitur telah menerima dan memanfaatkan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp (.....) secara utuh untuk pembangunan/perbaikan*) rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
3. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran, penerimaan dan pemanfaatan dana subsidi perumahan pada angka 1 dan 2 di atas, LPK dan debitur bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Bersama Tentang Penerimaan dan Pemanfaatan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi*.

LPK

.....

Debitur

.....

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

.....
(Tanda tangan & nama lengkap)

*)Coret yang tidak perlu

